

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Penelitian Terdahulu

Pada penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan ini, disertakan pula beberapa penelitian – penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan sebagai parameter pembanding dalam penulisan penelitian ini. Penelitian pertama yang dijadikan bahan pembanding untuk penelitian ini adalah penelitian yang disusun oleh Yacob (2012) yang berjudul Petani Padi Sawah dan Kemiskinan Studi Kasus di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan petani padi sawah. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Kriteria utama calon informan dalam penelitian ini adalah petani penyakap dan buruh tani yang tergolong miskin sesuai dengan indikator atau kriteria BPS. Berdasarkan hal tersebut, maka data yang diperoleh berupa data kualitatif dari sumber data, yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu sumber data primer, adalah informan, dan sumber data sekunder, berupa catatan lapangan observasi, buku, artikel, laporan hasil penelitian, kerangka teori dan dokumen yang relevan dengan kajian penelitian. Data dianalisis secara deskriptif dengan tiga tahap penting yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut, diantaranya adalah tahap reduksi data, tahap penyajian dan pengolahan data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kemiskinan petani padi sawah di desa Pallantikang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta sanitasi lingkungan yang buruk, ketiadaan sumberdaya lahan sawah milik sendiri, yang diperburuk oleh pengadaan dan distribusi pupuk/benih sulit diperoleh, produktivitas dan teknologi tani kurang intensif dilakukan, sehingga kualitas hasil panen terus menurun, menyebabkan pendapatan para petani rendah.

Penelitian kedua yang dijadikan bahan acuan sebagai penelitian pembanding dari penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Medah (2012) yang berjudul Analisis Faktor – Faktor Penyebab Kemiskinan Petani di Kecamatan Kupang Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik petani

miskin di Kecamatan Kupang Timur dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan petani di Kecamatan Kupang Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 160 orang petani di kecamatan Kupang Timur dan metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Jalur. Dalam penelitian ini terdapat sebelas variabel eksogen yaitu faktor usia, fasilitas kesehatan, permodalan, teknologi, akses kredit, pendidikan, kesempatan kerja, budaya, status lahan, luas lahan dan pasar dan tiga variabel endogen yaitu jumlah produksi, pendapatan dan kemiskinan. Selanjutnya terhadap hubungan antar variabel tersebut akan dilakukan pengujian hipotesis secara empiris menggunakan alat bantu analisis jalur dan komputasi menggunakan software Lisrel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik petani miskin di Kecamatan Kupang Timur terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan sebanyak 62,50 persen, 66 persen petani memiliki modal yang rendah. Penggunaan teknologi pertanian yang semi tradisional 65.63 persen, sementara 91 persen petani belum menggunakan akses kredit, curahan waktu kerja di sektor pertanian berkisar antara 5-8 jam/hari sebanyak 73,75 persen dan 43.75 persen petani cukup sering mengadakan lima kali pesta dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan petani di Kecamatan Kupang Timur yaitu faktor geografi dan lingkungan mempengaruhi kemiskinan sebesar 82,5 persen, diikuti faktor ekonomi sebesar 5,1 persen serta faktor sosial dan budaya mempengaruhi kemiskinan sebesar 3,2 persen serta pendapatan mempengaruhi kemiskinan petani sebesar 34.4 persen.

Penelitian berikutnya yang dijadikan sebagai bahan acuan pembandingan untuk penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Ginting (2008) yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Pendapatan Petani Miskin di Kecamatan Deli Tua. mengetahui apakah luas penguasaan lahan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, aksesibilitas terhadap lembaga keuangan dan keberadaan alternatif usaha berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani, untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan luas lahan terhadap tingkat pendapatan, untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan status lahan milik sendiri dan menyewa terhadap tingkat pendapatan, dan untuk mengetahui

distribusi pendapatan antara petani yang menguasai luas garapan 0,5 Ha dengan petani yang menguasai luas garapan yang lebih besar dari 0,5 Ha. Penelitian menggunakan data primer dengan teknik analisis analisis regresi linier berganda, chi-square, dan gini ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor - faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan rumah tangga petani selanjutnya terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga petani adalah keberadaan usaha dan luas penguasaan lahan. Kemudian berdasarkan hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa ada pengaruh perbedaan luas penguasaan lahan secara signifikan terhadap tingkat pendapatan rumah tangga petani, namun untuk status penguasaan lahan baik hak milik maupun sewa tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada tingkat pendapatan rumah tangga petani. Sedangkan berdasarkan Gini Ratio.istribusi pendapatan pada rumah tangga petani dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 Ha lebih merata dibandingkan dengan penguasaan lahan lebih besar dari 0,5 Ha.

Penelitian – penelitian di atas yang dijadikan sebagai bahan parameter dari penelitian ini adalah penelitian yang memiliki bahan permasalahan yang sama untuk diteliti. Bahan permasalahan yang dikaji yaitu analisis faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemiskinan dengan tolak ukur pendapatan pada suatu daerah tertentu dan pada kurun waktu tertentu. Beberapa variabel yang digunakan dalam analisis data juga memiliki kesamaan, seperti tingkat konsumsi, tingkat pendidikan terakhir, konsumsi pangan, konsumsi non-pangan, tingkat kepemilikan lahan dan tingkat pendapatan. Metode pengambilan data juga memiliki kesamaan dengan menggunakan metode wawancara dengan menitikberatkan kepada data primer.

Sedangkan perbedaan dari penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah sasaran analisisnya. Dalam penelitian ini, sasaran penelitiannya lebih kepada ruang lingkup mikro, yaitu rumah tangga petani di pedesaan. Sedangkan alat analisis yang digunakan menggunakan regresi linier berganda dummy variabel. Penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan petani di pedesaan ini, juga merujuk kepada evaluasi program – program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Lumajang dengan menggunakan variabel dummy. Analisis regresi linier berganda dummy

variabel ini dipergunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel – variabel yang akan diteliti dengan pendapatan petani miskin di Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.

Perbedaan lain dengan beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penggunaan matriks IFE dan EFE dalam penentuan strategi peningkatan taraf hidup petani miskin dengan meningkatkan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan kompleks, oleh karena itu pengertian/definisi kemiskinan sangat beragam sesuai evolusi ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu sosial. Tanpa mengurangi makna konsep kemiskinan yang sudah dipakai selama ini, maka definisi kemiskinan lebih mengikuti pemikiran konvensional yakni mereduksi masalah kemiskinan kepada terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). Definisi ini diperluas ke dalam ukuran pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier yang terus meningkat, tersedianya fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan dan pasar (Quibria, 1993). Secara spesifik kesejahteraan dinilai dari kekurangan pendapatan, konsumsi, kepemilikan harta benda baik diam maupun bergerak, aset modal dan stok. Nilai minimum penghasilan rumah tangga miskin adalah kurang dari 1920 kg setara beras per rumah tangga per tahun (Sayogyo, 1978; Tjondronegoro, Soejono & Hardjono, 1996; van Oostenbrugge, van Densen & Machiels, 2004). Makin tinggi pendapatan diasumsikan makin baik konsumsi kalori dan gizi.

Sehingga, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana suatu masyarakat atau suatu rumah tangga tidak mampu mencukupi kebutuhannya secara penuh sehingga kondisi tersebut dapat dikatakan kurang sejahtera. Hal ini dikarenakan, kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan.

Secara ekonomi penduduk miskin tidak memiliki apa-apa (*having nothing*), secara sosial mereka tidak menjadi siapa-siapa (*being nothing*), dan secara politik mereka tidak memperoleh hak kecuali korban pembangunan (*having no rights and being wrong*). Karena multidimensi, kemiskinan itu ibarat istilah kecantikan yang didefinisikan berbeda oleh orang yang melihatnya. Jadi kemiskinan itu tidak bisa

terlepas dari aspek politik, sehingga tidak ada definisi kemiskinan yang paling benar: *There is no one correct, scientific, agreed definition because poverty is inevitably a political concept and thus inherently a contested one* (Alcock, 1997). Strategi nafkah rumah tangga berkelanjutan (*sustainable household livelihood strategies*) merupakan salah satu upaya alternatif mengatasi kemiskinan. Definisi nafkah berkelanjutan adalah sebagai berikut: “*A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and social resources) and activities required for a means of living. A livelihood is sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks and maintain or enhance its capabilities and assets both now and in the future, while not undermining the natural resource base*”: Penghidupan terdiri dari kemampuan, aset (termasuk bahan dan sumber daya sosial) dan kegiatan yang diperlukan untuk hidup. Mata pencaharian dapat dikatakan berkelanjutan ketika dapat mengatasi dan pulih dari tekanan dan guncangan dan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan aset baik sekarang maupun di masa depan, dengan tidak merusak basis sumber daya alam (Carney 1998).

2.2.1.1. Ukuran Kemiskinan

Berdasarkan tipenya kemiskinan dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian (Bintoro, 1977), yaitu:

a. Kemiskinan Relatif (*relative poverty lines*)

Tipe kemiskinan ini diperoleh dari penentuan sederhana nilai prosentase distribusi kesejahteraan, seperti tingkat konsumsi dan pendapatan penduduk di suatu tempat tertentu, misalnya ada yang mempersyaratkan hingga 30%. Kemiskinan relatif muncul sebagai akibat adanya tingkat pengeluaran dan pendapatan, semakin kaya suatu daerah maka garis kemiskinan akan semakin tinggi. Pandangan ini memiliki dua kekurangan, yaitu: pertama, kemiskinan relatif tidak begitu berguna jika ingin melihat kemiskinan berdasarkan waktu dan tempat. Keberadaannya selalu dibawah 30% penduduk, sekalipun standar hidup seluruh penduduk menggunakan ukuran lampau. Pendekatan ini juga tidak dapat dipakai untuk membandingkan kemiskinan antar wilayah atau negara. Kedua, kemiskinan relatif masih sangat subyektif, tidak jelas mengapa harus

menggunakan ukuran dalam bentuk persen, padahal belum tentu dapat mewakili masyarakat yang disebut miskin itu.

b. Kemiskinan Absolut (*absolute poverty lines*)

Tipe kemiskinan ini adalah kemiskinan yang menggambarkan hubungan secara jelas mengenai spesifikasi tingkat kesejahteraan. Cara ini dapat dipakai dalam waktu dan kelompok yang berbeda. Jika dua individu mempunyai standar hidup sama dalam berbagai aspek tetapi berdomisili pada wilayah yang berbeda, keduanya dapat disebut penduduk miskin apabila standar hidupnya berada di bawah garis kemiskinan di wilayah tempat mereka tinggal.

c. Kemiskinan Subyektif (*subjective poverty lines*)

Tipe kemiskinan ini adalah jenis kemiskinan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari aspek kebutuhan dasar. Rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih kecil dari pendapatan minimum yang telah ditetapkan maka rumah tangga tersebut digolongkan dalam keluarga miskin. Kemiskinan subyektif dipilih sebagai tingkat pendapatan pada tiap-tiap penduduk yang merasa pendapatan mereka sesuai dengan kebutuhan pendapatan minimum.

Selain itu terdapat 14 kategori kemiskinan menurut BPS (2014). Jika 14 kategori ini memenuhi atau salah satu memenuhi, maka suatu rumah tangga dapat dikatakan masuk dalam kondisi kemiskinan, kategori tersebut diantaranya adalah :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.2.1.2. Garis Kemiskinan

Dalam metode untuk mengukur garis kemiskinan, yaitu menurut Bank Dunia (Ruslan, 2013). Garis kemiskinan internasional dinyatakan dalam suatu mata uang tunggal (*common currency*), yakni dollar Amerika Serikat. Dollar AS dipilih sebagai acuan (*benchmark*) karena mata uang ini dapat diterima di hampir semua negara. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari. Artinya, yang dianggap miskin di dunia ini—di negara manapun individu tersebut berada—adalah yang memiliki pengeluaran kurang dari 1,25 dollar AS per hari.

Penentuan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari didasarkan pada garis kemiskinan 75 negara (*less-developed countries* dan *developing countries*)—termasuk Indonesia—yang dikumpulkan oleh Bank Dunia sepanjang tahun 1990 – 2005. Sebagian besar garis kemiskinan tersebut ditentukan dengan menggunakan metode penghitungan yang sama, yakni metode biaya pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Sekedar informasi, garis kemiskinan Indonesia yang digunakan oleh Bank Dunia adalah garis kemiskinan tahun 1999. Untuk menghitung garis kemiskinan internasional, Bank Dunia mengkonversi garis kemiskinan 75 negara tersebut—yang dinyatakan dalam mata uang masing-masing negara—ke dollar AS. Selanjutnya, dengan menggunakan teknik statistik tertentu (*analisis regresi*), para peneliti Bank Dunia menemukan bahwa rata-rata garis kemiskinan untuk 15 negara termiskin (*less-developed*

countries) adalah sebesar 38 dollar AS per kapita per bulan atau sekitar 1,25 dollar AS per kapita per hari. Berdasarkan temuan ini, Bank Dunia kemudian menetapkan bahwa garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari.

Karena merupakan rata-rata garis kemiskinan dari 15 negara termiskin— dari 75 negara yang diikutkan dalam penghitungan, garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari boleh dibilang hanya mengukur kemiskinan dari perspektif negara-negara miskin. Karena itu, Bank Dunia juga menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar 2 dollar AS per kapita per hari yang merupakan median (nilai tengah) dari garis kemiskinan seluruh negara berkembang (developing countries). Garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari merupakan revisi atau penyempurnaan terhadap garis kemiskinan internasional yang digunakan Bank Dunia sebelumnya, yakni sebesar 1,08 dollar AS per kapita per hari. Garis kemiskinan sebesar 1,08 dollar AS merupakan hasil revisi terhadap garis kemiskinan sebelumnya: 1 dollar AS per kapita per hari.

2.2.1.3. Penyebab Kemiskinan

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hidayana (2009) yaitu :

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Hudayana (2009), juga mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya :

1. Keengganan bekerja dan berusaha.
2. Kebodohan.
3. Motivasi rendah.
4. Tidak memiliki rencana jangka panjang.
5. Budaya kemiskinan.
6. Pemahaman keliru terhadap kemiskinan.

Selanjutnya, Rahmawati (2006) mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu :

1. Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

2. Rendahnya Derajat Kesehatan
Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
3. Terbatasnya Lapangan Kerja
Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
4. Kondisi Keterisolasian
Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.
5. Faktor Budaya dan Etnik
Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan seperti, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

2.2.2. Rumah Tangga Petani di Pedesaan

Pada umumnya petani di pedesaan merupakan petani gurem, atau petani tanpa modal yang memiliki keterbatasan modal. Petani berlahan sempit dapat diidentikkan dengan petani miskin di pedesaan. Artinya, rumah tangga petani berlahan sempit dan rumah tangga petani yang tidak mempunyai lahan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Anggota masyarakat lapisan bawah ini disertai oleh berbagai keterbatasan, antara lain aksesibilitas terhadap peluang-peluang ekonomi sebagai sumber pendapatan (Nurmanaf dkk, 2002).

Berbagai studi mengidentifikasi bahwa kemiskinan suatu komunitas dicirikan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia (Quibria dkk, 1998), rendahnya penguasaan aset produktif seperti lahan pertanian (Otsuka, 1993) dan rendahnya aksesibilitas anggota masyarakat terhadap sumber-sumber permodalan dan peluang - peluang ekonomi (Siamwalla, 1993). Lebih lanjut Kasryno dan

Suryana (1992) melihat bahwa ada dua karakteristik desa miskin, yaitu terbatasnya aset produktif seperti lahan dan kapital dan kualitas sumberdaya manusia sebagian besar sangat rendah. Kedua karakteristik ini diduga merupakan kendala dalam mengaplikasikan teknologi atau pemanfaatan secara optimal kesempatan-kesempatan ekonomi. Akan tetapi, Binswanger dan Braun (1991) membuktikan bahwa dalam kondisi tertentu perubahan teknologi dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada kenyataannya, rumah tangga lapisan bawah ini bekerja dan berusaha dengan lebih mengandalkan tenaga fisik dengan atau tanpa mengikutsertakan keterampilan dan permodalan yang memadai. Di banyak kasus dijumpai angkatan kerja rumah tangga dari golongan ini melakukan jenis-jenis pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah, dengan konsekuensi menerima pendapatan yang rendah pula. Kegiatan-kegiatan yang dijadikan sumber pendapatan rumah tangga tidak terbatas hanya pada kegiatan di sektor pertanian. Aktivitas di luar sektor tersebut juga dilakukan oleh sebagian angkatan kerja rumah tangga petani berlahan sempit, lebih-lebih lagi bila sumberdaya lahan yang dikelola memiliki produktivitas yang rendah. Bekerja dan berusaha di luar sektor pertanian merupakan kegiatan tambahan dalam upaya memenuhi kebutuhan yang tidak cukup hanya dari usahatani dengan luasan sempit. Oleh karena itu banyak kasus dijumpai bahwa pendapatan dari sektor luar pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap total pendapatan rumah tangga.

Menurut Nurmanaf dkk (2002), petani berlahan sempit, pada dasarnya menghadapi permasalahan yang dicirikan tidak hanya oleh tingkat pendapatan yang rendah tapi juga tidak stabilnya pendapatan yang mereka terima. Dengan perkataan lain, disamping memang menerima pendapatan yang rendah, pendapatan yang diperolehpun hanya pada waktu-waktu tertentu. Lebih banyak waktu yang justru tidak memperoleh pendapatan atau secara umum dapat dikatakan bahwa fluktuasi memperoleh pendapatan menurut waktu yang sangat tinggi. Sehingga kelompok rumah tangga yang kurang beruntung tersebut menghadapi dua hal yang berat, yaitu pendapatan yang rendah dan stabilitas pendapatan juga rendah. Sehingga, upaya - upaya meningkatkan pendapatan petani berlahan sempit seyogyanya memperhatikan kedua hal tersebut. Program -

program hendaknya diarahkan tidak hanya pada upaya peningkatan pendapatan tapi juga menstabilkan pendapatan secara bersama-sama. Untuk itu diperlukan berbagai informasi mengenai karakteristik petani berlahan sekaligus identifikasi sumber - sumber pendapatan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya stabilitas pendapatan.

2.2.3. Kemiskinan Petani

Kemiskinan sebagai salah satu permasalahan yang krusial dalam proses pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat kompleks. Untuk menelisik sebab dan akibatnya, kita tidak bisa melihat dari satu sisi kaca mata aspek saja. Berbagai aspek perlu kita ikut sertakan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan banyak aspek lain. Namun, dalam beberapa kurun waktu terakhir kemiskinan selalu terfokus kepada satu kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Seperti yang sudah disebutkan pada bab yang sebelumnya, kemiskinan petani ini merupakan akibat petani yang kurang optimal dalam mengasah produktivitasnya.

Berbagai spekulasi muncul dalam menjabarkan penyebab petani mengalami jerat kemiskinan ini, namun menurut Nofrizal (2011) Tanah atau lahan merupakan faktor yang paling utama dalam bertani. Tanpa ada lahan, pertanian tidak mungkin dilakukan. Ada pun lahan, kalau luasnya tidak mencukup atau tidak sesuai dengan skala ekonomi, dipastikan usaha pertanian tidak akan menguntungkan petani. Inilah sesungguhnya yang menjadi satu persoalan petani di Indonesia. Kepemilikan lahan pertanian petani di Indonesia rata - rata hanya 0,3 Ha per keluarga tani. Dengan lahan seluas itu, jelas sulit sekali buat petani mengangkat taraf hidupnya. Bagaimana pun kerasnya, petani dalam berusaha, apapun komoditi yang dikembangkan, tidak akan pernah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi kebutuhan hidup terus meningkat seiring bertambahnya ragam kebutuhan. Kepemilikan lahan petani semakin lama semakin menurun seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkat kegunaan lahan untuk sektor non pertanian. Persoalan ini makin berkelindan ketika , banyak lahan petani yang berpindah tangan, baik yang disebabkan karena tekanan ekonomi sehingga petani terpaksa menjual lahannya, maupun karena lahan tersebut tidak

produktif lagi karena suatu sebab seperti hilangnya sumber air atau ketiadaan irigasi. Ironinya, disatu sisi petani begitu mudah kehilangan lahan, disisi lain sekelompok pengusaha begitu mudah mendapatkan lahan. Tidak tanggung, satu korporat besar di Indonesia, seperti perusahaan perkebunan bisa menguasai ratusan ribu ha lahan.

Dalam usaha peningkatkan kepemilikan lahan ini, pemerintah memang meluncurkan program reforma agraria. Melalui Program Agraria Nasional, pemerintah berjanji akan membagi tanah - tanah terlantar kepada petani atau rakyat miskin yang tidak memiliki tanah. Tujuannya tentu agar petani miskin yang tidak berlahan kembali memiliki lahan. Sayangnya, janji pemerintah yang telah disampaikan pada beberapa kesempatan itu hanya tinggal janji. Sampai saat ini belum ada tanah - tanah yang dibagikan pada petani.

Masalah kedua yang terus menjerat petani dalam kubangan kemiskinan adalah soal harga komoditi pertanian. Dalam tata niaga hasil pertanian, petani adalah kelompok yang paling dirugikan dalam masalah harga. Tidak saja karena harga yang tidak menguntungkan, petani merupakan kelompok yang paling sedikit menikmati pertambahan nilai dari hasil per-tanian. Keuntungan terbesar justru dinikmati kelompok pedagang, apakah itu pedagang pengumpul, pedagang besar atau pengecer. Padahal untuk menghasilkan suatu produk pertanian, petani harus menunggu dalam waktu yang cukup lama agar bisa menikmati hasil pertanian. Itupun harus menghadapi resiko kegagalan, baik karena serangan hama, iklim yang tidak menentu, kekurangpahaman teknis berbudidaya dan tidak tersedianya sarana produksi. Sementara, para pedagang, dalam hitung jam, dalam tata niaga hasil justru bisa menerima keuntungan yang kadang nilainya bisa dua kali lipat dari keuntungan yang dinikmati petani. Posisi sebagai produsen utama suatu komoditi pertanian pun tidak menjamin kalau keuntungan yang besar buat petani. Pemerintah yang diharapkan melindungi petani dalam masalah harga ini terkesan membiarkan petani bertarung sendirian untuk mendapatkan harga yang layak. Tidak ada upaya yang serius dari pemerintah agar petani bisa mendapat porsi keuntungan yang besar dalam tata niaga hasil pertanian. Bahkan dalam kasus - kasus tertentu pemerintah ikut menekan harga sehingga harga yang tadi justru cukup menguntungkan buat petani anjlok dan kembali merugikan.

Kebijakan pemerintah membuka kran impor berbagai produk hasil pertanian seperti impor kentang yang baru ini banyak didemo petani kentang di Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah salah satu contoh dari kebijakan pemerintah yang tidak pro pada petani. Dan tidak hanya kentang yang diimpor, beras, garam, jagung, berbagai jenis sayuran bahkan cabe diimpor sehingga me-nekan harga komoditi itu ditingkat petani. Kebijakan impor ini semakin leluasa, ketika Indonesia yang tergabung dalam negara ASEAN meratifikasi perjanjian kerjasama dengan Cina dalam perjanjian ACFTA dimana berbagai produk pertanian dari negara tirai bambu itu bebas masuk ke ASEAN, termasuk ke Indonesia. Serbuan berbagai produk pertanian dari Cina dan negara - negara ASEAN sendiri kini sudah sangat terasa menekan harga produk pertanian di Indonesia.

2.2.4. Kemiskinan Petani di Pedesaan

Desa merupakan suatu masyarakat para petani yang mencukupi hidup sendiri atau swasembada. Desa hingga saat ini menjadi kantong utama kemiskinan. Penyebab kemiskinan di desa, umumnya bersumber dari sektor pertanian akibat adanya ketimpangan kepemilikan lahan pertanian (Yustika, 2002). Sahdan (2005) menambahkan bahwa penyebab utama kemiskinan di desa adalah : (1) Pengeruh faktor pendidikan yang rendah; (2) Ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian; (3) Ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; (4) Alokasi anggaran kredit yang terbatas; (5) Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar; (6) Kebijakan Pembangunan Perkotaan mengakibatkan orang desa pindah ke kota; (7) Pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional; (8) Rendahnya produktivitas dan pemebentukan modal; (9) Budaya menabung yang kurang berkembang di kalangan masyarakat desa; (10) Tata pemerintahan yang buruk; (11) Tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa; (12) Rendahnya Jaminan Kesehatan.

Analisis mengenai kemiskinan pedesaan juga diketengahkan oleh Boeke (Nasikun, 1985) yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia bersifat dual economy, dimana petani gurem yang memiliki lahan sempit yang mengolah lahan pertanian mereka dengan cara yang sangat tradisional, yang hidup secara under

subsistence, berhadapan-hadapan dengan ekonomi modern yang bersentuhan dengan teknologi yang modern, perdagangan internasional, dan manajemen yang modern.

Kemiskinan petani pedesaan dapat juga dijelaskan melalui *capability approach* yang diketengahkan oleh Sen (1999). Menurut Sen, kemiskinan berkaitan dengan *freedom of choice*; orang miskin sama sekali tidak memiliki *freedom of choice* karena terjadi *capability deprivation*. *Capability* mengacu pada dua perkara, yaitu *ability to do* dan *ability to be*. Petani miskin dipedesaan benar-benar mengalami *ability to do* dan *ability to be* yang rendah karena mereka dalam posisi yang dirampas. Berbagai macam *deprivation* dapat diketengahkan disini:

Structural deprivarion. Struktur berkaitan dengan: (1) *power relations*, dimana posisi petani selalu dalam posisi yang lemah; (2) adanya kebijakan pemerintah yang memengaruhi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan; (3) dualisme ekonomi yang muncul dalam wajah baru.

1. *Social capability deprivation*: orang miskin tidak dapat meraih kesempatan, informasi, pengetahuan, ketrampilan, partisipasi dalam organisasi.
2. *Economic capability deprivation*: orang miskin tidak dapat mengakses fasilitas keuangan pada lembaga-lembaga keuangan resmi seperti perbankan, tetapi mereka terjebak pada Bank Plecit dan kaum rentenir yang tidak membutuhkan prosedur yang berbelit-belit.
3. *Technological capability deprivation*: dimana orang miskin tidak dapat memiliki teknologi baru yang memerlukan modal yang cukup besar. Teknologi tradisional seperti pembuatan alat-alat dari bahan lokal (tanah, bambu, kayu, dll) telah digantikan oleh alat-alat pabrikan.
4. *Political capability deprivation*: petani miskin di pedesaan tidak mampu memengaruhi keputusan politik yang dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak didengarkan aspirasinya, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *collective action*.
5. *Psychological deprivation*: petani miskin pedesaan selalu memperoleh stigma sebagai orang-orang yang kolot, bodoh, malas, tidak aspiratif. Stigma inilah yang berakibat mereka menjadi rendah diri dan merasa disepelkan, merasa teralienasi di dalam kehidupan sosial dan politik.

2.2.5. Pendapatan Petani Miskin di Pedesaan

Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya pendapatan petani. Di samping itu pendapatan juga dapat digunakan sebagai indikator penentuan suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin. Hal ini telah diimplementasikan oleh Badan Pusat Statistik dengan menentukan bahwa rumah tangga yang pendapatan kapitanya kurang dari \$1 maka rumah tangga tersebut dikatakan berada dibawah garis kemiskinan. Sedangkan untuk melihat tingkat pendapatan petani dapat diketahui melalui tingkat pengeluaran. Menurut Keynes (1938), tingkat konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dalam perekonomian tergantung dari tingkat pendapatan, begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dirumuskan melalui fungsi :

$$C = f(Y) \text{ atau } C = a + bY$$

Keterangan :

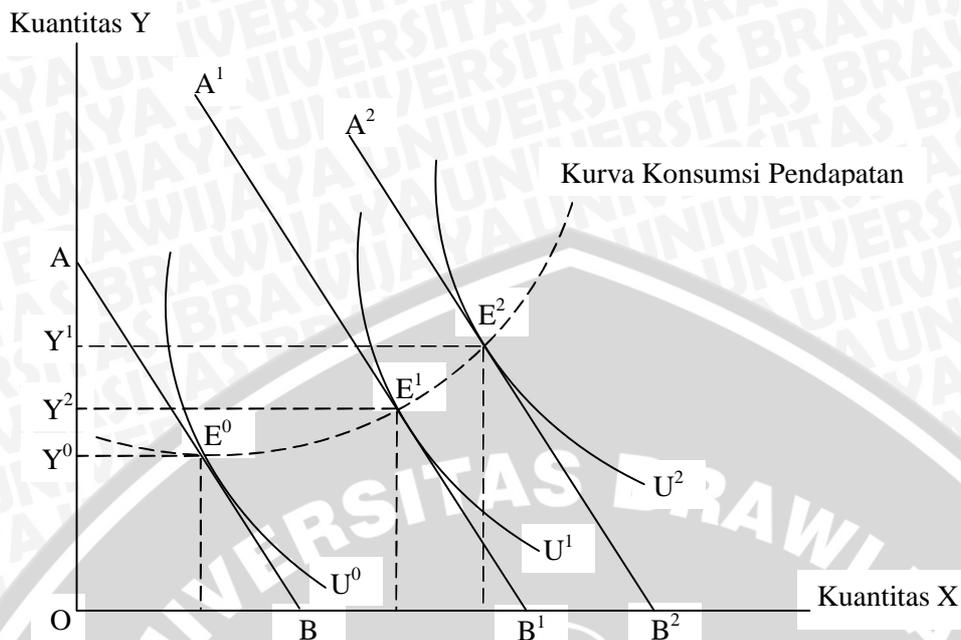
- C : Tingkat Konsumsi
- Y : Tingkat Pendapatan
- a : Konstanta
- b : Koefisien Perubah

Selain dengan fungsi tersebut hubungan konsumsi dan pendapatan dapat dijelaskan melalui kurva konsumsi – pendapatan. Menurut Sudarsono (1983). Kurva konsumsi pendapatan (*Income Consumption Curve*) adalah kurva yang menghubungkan berbagai titik ekuilibrium konsumen pada berbagai tingkatan pendapatan (anggaran belanja) dengan fungsi anggaran belanja adalah :

$$Y = P_1Q_1 + P_2Q_2$$

Keterangan :

- Y : Tingkat Pendapatan
- P₁, P₂ : Harga barang 1 dan harga barang 2
- Q₁, Q₂: Kuantitas Konsumsi barang 1 dan barang 2



Gambar 2. Kurva Konsumsi – Pendapatan (*Income Consumption Curve*) atau Jalur Ekspansi Pendapatan (*Income-Expansion Path*).

Sumber : Sudarsono, 1983.

Gambar 2. diasumsikan bahwa terdapat dua barang yang dikonsumsi oleh petani, dimana barang tersebut merupakan barang normal. Sifat barang normal ini dapat dilihat melalui penambahan kuantitas X dan Y yang diminta setiap kali terdapat penambahan pendapatan. Kenaikan pendapatan di mana rasio harga relatif tetap akan menggeser garis anggaran ke kanan sejajar dengan garis anggaran sebelumnya. Pergeseran garis anggaran tersebut akan menggeser titik keseimbangan konsumen. Dimana titik keseimbangan konsumen awal adalah E⁰ berpindah ke E¹ sampai E² bersamaan dengan pergeseran *budget line*. Kurva konsumsi pendapatan dapat dikatakan merupakan garis yang menghubungkan berbagai titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan.

2.2.6. Strategi Peningkatan Taraf Hidup Petani Miskin di Pedesaan

Upaya konkrit yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin di pedesaan adalah penyusunan kebijakan mengenai pertanian yang tepat sasaran. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak program yang disusun sesuai dengan UU Agraria, diantaranya adalah Menurut Direktorat Permukiman dan Perumahan (2002), terdapat beberapa program dari pemerintah yang berfungsi untuk pembangunan pedesaan, diantaranya yaitu program bidang pangan, program

Inpres Desa Tertinggal, dan Program Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya dari perkotaan. Guna mendorong peningkatan pangan, program-program pembangunan yang pernah dilaksanakan adalah KOGM (Komando Gerakan Makmur), Bimas (Bimbingan Massal, Inmas (Intensifikasi Massal), Insus (Intensifikasi Khusus), dan Supra Insus. Selain itu guna menyokong program pangan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Tani (KUT) bagi para petani dalam memberikan permodalan dalam pengelolaan lahannya.

Selain program kebijakan yang berfokus kepada kegiatan, peningkatan taraf hidup juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan membangun perekonomian yang terdistribusi merata. Selama ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan didesain secara sentralistik oleh BAPPENAS. BAPPENAS merancang program penanggulangan kemiskinan dengan dukungan alokasi dan distribusi anggaran dari APBN dan hutang kepada Bank Dunia serta lembaga keuangan multinasional lainnya. Berkat alokasi anggaran yang memadai, pemerintah pusat menjalankan kebijakan sentralistik dengan program – program yang bersifat karitatif. Adapun strategi dan kebijakan tersebut, antara lain :

1. Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai.
2. Redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang.
3. Mendorong perkembangan investasi pertanian ke daerah pedesaan.
4. Membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh kredit usaha yang mudah.
5. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat desa.
6. Memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberika kemudahan bagi masyarakat untuk menggali sumber – sumber pendapatan yang memadai.
7. Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem layanan kesehatan yang gratis.

8. Memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa.
9. Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan.
10. Mendorong agenda pembangunan daerah untuk memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skal prioritas utama.

Namun, kebijakan ini kurang mampu berjalan dengan baik, hal ini dapat diakibatkan oleh faktor internal ataupun eksternal petani di suatu wilayah tersebut. Faktor internal dapat disebabkan oleh rendahnya produktivitas petani dalam memproduksi komoditi yang menjadi fokus produksinya. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan gagalnya kebijakan ini adalah pengesampingan pemerintah terhadap program – program yang telah dicanangkan BAPPENAS, sehingga anggaran yang dikeluarkan untuk menumbuhkan perekonomian dari sektor pertanian berkurang.

Menurut Kian Wie (1987), Pembangunan pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dan pembangunan pertanian bertujuan untuk mensejahterakan petani. Inti upaya mensejahterakan petani adalah membuat pertanian dan petani maju. Sehingga paradigma baru pertanian di Abad 21 adalah dengan menetapkan keberdayaan petani sebagai salah satu fokus pembangunan pertanian. Sedangkan focus pembangunan pertanian lainnya adalah daya saing produk, dan kelestarian lingkungan. Upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendekatan paradigma baru pertanian Abad 21 adalah melalui :

1. Salah satu upaya dalam mewujudkan keberdayaan petani dapat dilakukan melalui *Employment shifting* atau bisa disebut pergeseran ketanagakerjaan. Yang berarti bahwa persepsi pola pikir masyarakat dalam menumbukembangkan perekonomian⁴ yang berfokus kepada industri pengolahan diubah menjadi industri bahan baku. Beban sektor pertanian dengan jutaan petani gurem harus dikurangi. Ini berarti industri nasional harus bergerak dengan laju yang lebih cepat, dan investasi harus segera masuk untuk kemudian menyerap tenaga-tenaga kerja. Tanpa employment shifting, yang terjadi adalah bertambahnya kegureman petani yang akan semakin memperlihatkan betapa terpuruknya petani-petani kita.

2. Sementara itu daya saing produk pertanian harus selalu diperbaiki. Lembaga-lembaga riset pertanian di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan setiap tahun menyerap anggaran cukup besar jangan hanya jadi macan kertas. Lembaga-lembaga riset depertemen harusnya lebih banyak menghasilkan karya terapan yang bisa langsung diimplementasikan di lapangan oleh petani-petani kita. Hasil riset yang hanya ditumpuk-tumpuk menjadi laporan atau makalah seminar, tidak akan pernah mensejahterakan petani Indonesia.
3. Menyangkut kelestarian lingkungan, maka sudah saatnya pemerintah memberi apresiasi kepada petanipetani yang mempraktekkan pola pertanian ramah lingkungan. Pemanfaatan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pestisida akan lebih baik bagi lingkungan hidup kita. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita saat ini, tetapi juga untuk anak cucu kita di tahun-tahun mendatang. Rusaknya lingkungan berarti hancurnya kehidupan di masa datang, dan generasi saat ini akan terus dikutuk oleh anak cucu kita nanti apabila kita tidak berusaha menerapkan cara hidup yang lebih bersahabat terhadap lingkungan.

2.2.7. Program Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang

Kemiskinan di Kabupaten Lumajang mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintahnya, hal ini dikarenakan Kabupaten Lumajang berusaha untuk mencapai tingkat kemiskinan sesuai yang ditetapkan oleh Millineum Development Goals. Jika kemiskinan berhasil ditekan lajunya, maka pertumbuhan ekonomi suatu Kabupaten Lumajang dapat meningkat secara signifikan. Menurut RPJMD Kabupaten Lumajang (2013), tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Lumajang mencanangkan beberapa program yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang (2014) Program – program prokemiskinan yang dilakukan di Indonesia pada awalnya dikelompokkan menjadi tiga kluster, yaitu :

1. Kelompok Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program bantuan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program bantuan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Berdasarkan kluster – kluster tersebut, menurut BAPPEDA Kabupaten Lumajang (2014) terdapat banyak program yang terkait dengan masing – masing kluster, klasifikasi program – program berdasarkan kluster – kluster tersebut adalah :

1. Program – Program Penanggulangan kemiskinan kluster 1
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota RTSM diwajibkan melaksanakan ketentuan yang telah diterapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan MDGs yang akan terbantu oleh PKH yaitu : Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

- b. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam

dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lain – lain.

Keadaan tersebut sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama disebabkan oleh banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikut. Hal tersebut didukung oleh data SUSENAS BPS yang mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya maupun karena anak harus bekerja. Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu atau pra sejahtera 1 untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan level yang lebih tinggi. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. Bantuan Pendidikan Siswa Miskin berupaya meringankan biaya pendidikan siswa, bisa dalam bentuk pembiayaan iuran bulanan sekolah dan atau pembelian perlengkapan belajar siswa, dan atau transportasi siswa ke sekolah.

Nilai beasiswa untuk siswa miskin jenjang pendidikan dasar adalah Rp. 30.000 per siswa per bulan / Rp. 360.000 per siswa per tahun. Sementara siswa miskin jenjang pendidikan menengah, atas dan kejuruan adalah Rp. 65.000 per siswa per bulan.

c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non-personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang terolong dalam biaya persoil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan bebas masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri

(TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

d. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa.

e. Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp. 1000/Kg di titik – titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

2. Program – Program Penanggulangan kemiskinan kluster 2

a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yakni : (1) PNPM-Inti terdiri dari program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, Program Pengembangan Infrastruktural Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). (2) PNPM-Penguatan terdiri dari program – program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. Pelaksanaan program – program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.

b. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif

Padat Karya adalah suatu kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak. Secara teknis konsep program ini adalah untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan – kegiatan yang bersifat usaha – usaha produktif dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM, dan teknologi sederhana yang ada serta peluang pasar. Pemanfaatan potensi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan memperluas kesempatan kerja.

Jenis – jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam kegiatan Padat Karya Produktif lebih berorientasi pada kegiatan usaha yang bersifat ekonomi produktif dan berkelanjutan seperti usaha di sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan, di bidang usaha industri kecil, serta sarana penunjang ekonomi rakyat.

3. Program – program Penanggulangan Kemiskinan Klaster 3

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari 5 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Agunan pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai, namun Pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70% dari plafon kredit.

Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

b. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidup sehari – hari, ditandai dengan meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan kesehatan, tingkat pendidikan; meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah – masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya; meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan – peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; keluarga miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan.

